

REVIU SHEET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

Nama : Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

KOREKSI/SARAN/MASUKAN/PENJELASAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan tanggal 24 Desember 2024.
2. Revisi Ke-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan tanggal 10 Juni 2025 karena terdapat pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
3. Revisi Ke-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan tanggal 31 Oktober 2025 karena mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.
4. Revisi Ke-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terletak pada perubahan indikator kinerja dan targetnya. Sebelumnya terdapat sebelas indikator kinerja menjadi enam belas indikator kinerja.

Palangka Raya, 31 Desember 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,




Pujiastuti Handayani

REVISI KE-2 PERJANJIAN KINERJA



TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



REVISI KE-2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun I (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100
		9. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu.	75
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,90
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	71
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Palangkaraya DIPA 01.	94
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Palangkaraya DIPA 03.	92
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Palangkaraya DIPA 01.	85
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Palangkaraya DIPA 03.	85
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	3,00

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp24.163.127.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp447.628.000	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding	Rp150.000/Perkara	Dibiayai oleh Pihak Yang Berperkara

Palangka Raya, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



Dr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.

REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA



TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Pujiastuti Handayani, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Juni 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

DR. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.

**REVISI KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun I (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100
		2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100
		3. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	25
		5. <i>Index</i> Persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan Peradilan.	3,76
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
		3. Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan daerah yang selesai ditindaklanjuti.	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun I (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan hakim pengawas bidang yang selesai ditindaklanjuti.	100
4	Terwujudnya pemberian dukungan kesekretariatan terkait pengelolaan anggaran	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp24.163.127.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp447.628.000	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding	Rp150.000/Perkara	Dibiayai oleh Pihak Yang Berperkara

Palangka Raya, 10 Juni 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI



BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



Jr. PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H.